Tabel 7.5 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Satuan		2021		Target 2022	2023	Kondi	si Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
nouc	dan Program Prioritas	Program (Outcome)	Sutuan	K	Rp	К	Rp	Rp	К	Rp	Penanggung Jawab
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	%	100	4.039.549.844,37		4.150.586.844,07	4.483.132.617,84		12.673.269.306,28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	%	100							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	%	100							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target 90% (laporan)	Dokumen	10							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase guru PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S1/DIVtenaga kependidikan		60,9	37.648.456.848,15		38.683.317.625,37	41.782.632.077,77		118.114.406.551,29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S1/DIV	%	93							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3. Persentase guru SMP yang memiliki kualifikasi S1/DIV	%	95,81							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		4. Persentase guru PAUD Formal yang memiliki sertifikat pendidik	%	24,57							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		5. Persentase guru SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	46,31							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	49,9							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		7. Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SD Nilai diatas 70	%	7,38							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		8. Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SMP Nilai diatas 70	%	30,94							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1			1		T	
9. Persentase guru SD yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran	%	20,16					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10. Persentase guru SMP yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran	%	13,24					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)		50,96 %					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal (0-6 tahun		10,15 %					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A		0,01					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B		5,75 %					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C		9,50 %					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6. Jumlah PAUD yang terakreditasi A		21 lembaga					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7. Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi		20 lembaga					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8. Jumlah dokumen kurikulum PAUD		1 dokumen					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9. Jumlah kerjasama dalam melaksanakan program holistik integratif untuk PAUD		2 kerjasama					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10. Jumlah dokumen kurikulum PNF		1 dokumen				-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11. Angka Kelulusan Paket A	%	100					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12. Angka Kelulusan Paket B	%	100					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13. Angka Kelulusan Paket C	%	100					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase sekolah penerima BOP	%	100					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase sekolah penerima BOS	%	100					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	%	100					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan		1,96 %					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		106,55 %					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SD		106,15 %					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		105,45 %					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SMP		109,79 %					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD		88,25 %					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP		77,50 %					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		9. Jumlah SD/MI yang		48 sekolah					DINAS PENDIDIKAN DAN
		terakreditasi A 10. Jumlah SMP/MTs yang		17 sekolah					KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
		terakreditasi A 11. Rata-rata nilai USBN		69,10 point					KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
		SD 12. Rata-rata nilai UN SMP							KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
				58,06 point				-	KEBUDAYAAN
		13. Persentase Siswa SD miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	%	85				-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		14. Persentase Siswa SMP miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	%	85				-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		15. Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SD Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional		8 prestasi				-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		16. Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SMP Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional		12 prestasi				-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase jumlah pendidik dan tenaga kepedidikan yang tersedia							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN								
1.02	BIDANG KESEHATAN								
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	3.765.212.277,92	3.868.708.432,36	4.178.670.056,45	11.812.590.766,74	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100				-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	skor	75					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	%	90	57.102.893.893,95	58.672.507.899,52	63.373.359.916,73	179.148.761.710,20	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda	%	35					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3. Pers	sentase Penduduk								DINAS KESEHATAN,
	lemanfaatkan	%	30						PENGENDALIAN
Puskesi		,,,							PENDUDUK DAN
T dones.	ando								KELUARGA BERENCANA
4 Porc	sentase penduduk								DINAS KESEHATAN,
midrin	yang dilayani	%	100						PENGENDALIAN
	standar	70	100						PENDUDUK DAN
sesuais	standar								KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
1. Prev	valensi stunting								PENGENDALIAN
pada ba		%							PENDUDUK DAN
pada 55	anta								KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
2. Prev	alensi Kekurangan								
Gizi (un	nderweight) pada	%							PENGENDALIAN
balita	0 71								PENDUDUK DAN
									KELUARGA BERENCANA
	sentase ibu hamil								DINAS KESEHATAN,
	iendapatkan	%	100						PENGENDALIAN
pelayan	nan antenatal sesuai	⁷⁰	100						PENDUDUK DAN
standar	r								KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
	sentase kesehatan								PENGENDALIAN
	nan ibu bersalin	%	100						PENDUDUK DAN
yang se	esuai standar								KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
	sentase pelayanan	%	100						PENGENDALIAN
kesehat	tan pada usia lanjut	,,,							PENDUDUK DAN
									KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
6. Pers	sentase pelayanan	%	100						PENGENDALIAN
kesehat	tan balit	%	100						PENDUDUK DAN
									KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
7 Caku	upan kunjungan								PENGENDALIAN
bayi	upun nunjungun	%	100						PENDUDUK DAN
l bayı									KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
	sentase pelayanan	%	100						PENGENDALIAN
kesehat	tan bayi baru lahir	,,,							PENDUDUK DAN
									KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
	upan kelurahan	%	80						PENGENDALIAN
siaga al-	ktif	90	80						PENDUDUK DAN
									KELUARGA BERENCANA
	rsentase siswa kelas								DINAS KESEHATAN,
I - IX me	endapatkan	%	100						PENGENDALIAN
pelayan	nan kesehatan	70	100						PENDUDUK DAN
sesuai s	standar								KELUARGA BERENCANA
 						 			
11 Per	rsentase								DINAS KESEHATAN,
	faatan media	%							PENGENDALIAN
promos		,,							PENDUDUK DAN
promos									KELUARGA BERENCANA
 12 (-1	kupan Kelurahan								DINAS KESEHATAN,
	nelaksanakan	%	61						PENGENDALIAN
	si total berbasis		01						PENDUDUK DAN
masyar	rakat								KELUARGA BERENCANA
						+			DINACIZECTIATAN
12.5	mmi								DINAS KESEHATAN,
	rsentase TTU yang	%	81						PENGENDALIAN
memen	nuhi persyaratan								PENDUDUK DAN
1									KELUARGA BERENCANA

	14. Persentase TPM yang memenuhi Persyaratan	%	81				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	15. Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	%	100				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	16. Perkiraan Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	per 1.000 penduduk	49				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	17. Perkiraan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk	per 1.000 penduduk					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	18. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%	100				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	19. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosi	%	100				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	20. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	21. Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar	%	23				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	22. Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar	%	42,52				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	23. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 th) mendapatkan skring kesehatan sesuai standar	%	22,5				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	24. Persentase kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) ditanggulangi	%	100				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	25. persentas kelurahan universal child immunization (UCI)	%	100				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	26. persentase calon jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan	%	100				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1. Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	%	80				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

									DINAS KESEHATAN,
l		2. Cakupan SDM yang	%	3,87					PENGENDALIAN
· ·		sesuai standar							PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
· ·		3. Persentase fasilitas							PENGENDALIAN
1		pelayanan kesehatan	%	100					PENDUDUK DAN
· ·		terakreditasi							KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
· ·		4. Persentase sarana							PENGENDALIAN
1		kesehatan yang memenuhi	%	55					PENDUDUK DAN
1		standar							KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
1		5. Persentase PIRT yang							PENGENDALIAN
1		memiliki izin eda	%	100					PENDUDUK DAN
1		memma izm cua							KELUARGA BERENCANA
		6. Cakupan pengelolaan							DINAS KESEHATAN,
· ·		fasilitas pelayanan							PENGENDALIAN
1		kefarmasian dan	%	100					PENDUDUK DAN
· ·		perbekalan farmasi							KELUARGA BERENCANA
		per benaran narmasi							DINAS KESEHATAN,
	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase meningkatnya						_	PENGENDALIAN
.02.03	KAPASITAS SUMBER DAYA	kapsitas SDM Kesehatan			103.225.265,71	106.062.666,96	114.560.427,15	323.848.359,82	PENDUDUK DAN
1	MANUSIA KESEHATAN	naportas obri nesenatan							KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
· ·	PROGRAM SEDIAAN								PENGENDALIAN
.02.04	FARMASI, ALAT KESEHATAN				142.307.303,38	146.218.970,92	157.934.061,50	446.460.335,79	PENDUDUK DAN
· ·	DAN MAKANAN MINUMAN								KELUARGA BERENCANA
									DINAS KESEHATAN,
· ·	PROGRAM PEMBERDAYAAN								PENGENDALIAN
.02.05	MASYARAKAT BIDANG				557.568.767,24	572.894.921,25	618.795.366,66	1.749.259.055,15	PENDUDUK DAN
1	KESEHATAN								KELUARGA BERENCANA
	VIDUCAN DEMEDINIMATIAN								
02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM								
1.03									
	DAN PENATAAN RUANG								
	DAN PENATAAN RUANG								
	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM								
	DAN PENATAAN RUANG								
	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase layanan							
1.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DINAS PEKERJAAN UMUM
.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG	administrasi perkantoran	%	100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi	%	100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	
.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan	%	100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG
.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang		100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM
.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan /	%		9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG
.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara			9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM
.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara Persentase tingkat	%	100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1			9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM
.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara Persentase tingkat	%	100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM
.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	%	100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1	%	100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM
03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	%	100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
.03.01	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun Persentase laporan kinerja dan keuangan yang	%	100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71	10.612.565.655,09	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM
	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun Persentase laporan kinerja dan keuangan yang	%	100				-	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM
.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama 1 tahun	%	100	9.562.507.200,84	9.825.356.317,71 16.224.315.033,39	10.612.565.655,09 17.524.210.108,32	30.000.429.173,64	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama 1 tahun 1. Luas wilayah tergenang	%	100				-	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN	administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama 1 tahun 1. Luas wilayah tergenang	%	100				-	DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM

	1	2 navgantaga titily					1	1		i I
		3. persentase titik genangan dan banjir yang tertangani	%	40						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				5.429.618.409,41	5.578.864.875,20		6.025.844.544,92	17.034.327.829,52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				25.568.800.602,03	26.271.622.206,92		28.376.509.362,21	80.216.932.171,16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1. Presentase jalan yang di rehabilitasi	%	40	1.610.511.976,73	1.654.780.874,20		1.787.362.219,17	5.052.655.070,10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2. Panjang jalan baru	Km	20						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		3. Persentase jaringan perpipaan air minum yang terpasang	%	20						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		4. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	%							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		5. Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi	%							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase jalan yang di rehabilitasi			35.740.380.265,23	36.722.792.847,20		39.665.029.697,36	112.128.202.809,79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Panjang jalan baru								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Jalan Kota Kondisi Baik								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Jumlah RDTR yang tersusun	Dokumen	1	2.038.148.195,68	2.094.171.730,31		2.261.957.150,69	6.394.277.076,69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2. Jumlah RTBL yang tersusun								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		3. Persentase RTH publik wilayah perkotaan	Dokumen	13						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	3.202.984.787,07	3.291.026.730,99		3.554.704.391,97	10.048.715.910,03	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100								DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	skor	12								DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman	%	100	11.901.196.709,70		12.228.330.481,12		13.208.066.546,06		37.337.593.736,88	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana										DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Publik	%	100	6.062.768.822,43		6.229.418.990,35		6.728.521.174,24		19.020.708.987,02	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni										DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Terciptanya Lingkungan Perumahan yang Sehat Di Kawasan Permukiman			8.905.678.365,04		9.150.472.919,87		9.883.610.476,52		27.939.761.761,43	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2. Persentase Capaian Pembangunan PSU Di Lingkungan Perumahan	%	7								DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	1.156.535.980,19		1.188.326.226,68		1.283.535.140,36		3.628.397.347,24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100%	%	100								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	100								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase penegakan perda dan perkada	%	97	5.242.488.039,86		5.386.590.765,49		5.818.165.398,52		16.447.244.203,88	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2. meningkatnya penanganan penyidikan terhadap kasus pelanggar perda										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	3. rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENINGKATAN PASARANA DAN WETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN PENGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAPA KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN PENGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAPA KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN PENGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAPA PENGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAPA KETERTIBAN UMUM PERSAN PEMERINTAHAN DAPA KETERTIBAN UMUM PERSAN PEMERINTAHAN DAPA KETERTIBAN UMUM PERSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAPA KETERTIBAN UMUM PERSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAPA KETERTIBAN UMUM PERSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAPA KETERTIBAN UMUM PERSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAPA KETERTIBAN UMUM PERSAN PERSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAPA KETERTIBAN UMUM PERSAN PENUNJAN PEMERINTAHAN PERSAN PENUNJAN PEMERINTAHAN PERSAN PENUNJAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PERSAN PE	PROGRAM PENINGKATAN PERUMANAN ANSYARAKAT URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARKATAN PERISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENUNJANG Persentase tersenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran PROGRAM PENUNJANG Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% Persentase aparatur yang mendapatkan perida dan perkada Persentase aparatur yang mendapatkan perda dan perkada 2. Persentase penegakan perda dan perkada Persentase penegakan perda dan perkada Persentase penegakan perda dan perkada 2. Persentase penegakan perda dan perkada Persentase penegakan perda dan perkada 2. Persentase penegakan perda dan perkada Persentase penegakan perda dan perkada 2. meningkatnya penanganan penjidikan terhadap kasus pelanggar perda 3. rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan skor 12 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman Persentase Ketersediaan Runag Terbuka Publik Persentase Capaian Ketersediaan Runag Terbuka Publik Persentase Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni Persentase Capaian Permukiman Persentase Capaian Permukiman Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% Persentase penegakan Persentase pumlah Laporan yang terpenuhi Persentase penegakan Persentase pumlah Laporan yang terpenuhi Persentase penegakan Persentase penegakan Perda Ausasu pelanggar perda 3. rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Nilal Laporan Capalan Kinerja dan Keuangan Pendermangan Skor Nilal Laporan Capalan Kinerja dan Keuangan Pendermangan Permanganan Pasilitas Umum di Kawasan Permukiman Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi Umum di Kawasan Permukiman Persentase ketersediaan Pendermukiman Kumuh Persentase Ketersedianya bantuan rehabilitasi Persentase Ketersedianya bantuan rehabilitasi Persentase Ketersedianya bantuan rehabilitasi Persentase Capalan Remukiman Kumuh Persentase Ketersedian Ruang Terbuka Publik Persentase Capalan Ketersedian Rumah Layak Huni 1. Terciptanya Lingkungan Perumahan yang Sehat Di Kawasan Permukiman 2. Persentase Capalan Permukiman 2. Persentase Capalan Permukiman 2. Persentase Capalan Permukiman Permukiman 2. Persentase Capalan Permukiman Permukiman 2. Persentase Capalan Permukiman Permukiman Permukiman 1. Terciptanya Lingkungan Perumahan yang Sehat Di Kawasan Permukiman Permukiman Permukiman Persentase Capalan Permukiman Permukiman Permukiman 1. Terciptanya Lingkungan Perumahan yang Sehat Di Kawasan Permukiman Permukiman Permukiman Persentase Capalan Permukiman Persentase Capalan Permukiman Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan perkantoran Persentase pengakan Permukiman Persentase pumlah Laporan yang terpenuhi Persentase pumlah plois Janasia piran perjudikan terhadap kasus pelanggar perda Janasia piran perjudikan terhadap kasus pelanggar perda	Peningkatan Kapasitas Sumber Paya Aparatur Sumber Paya Paratur Paya Persentase Capaian Permukiman Persumkiman Persumka Persumkiman Persumkiman Persumkiman Persumkiman Persumkiman Persumkiman Persumkiman Persumkiman Persumkiman Sumber Persumkiman Per	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sakor 12	Peninglatan Kapasats Sumber Daya Aparatur Sumber Da	Peringkatan Kapasias % 100	Personal Reported Some Proposition 100 100 11961.196.709.70 12.28338.461.12 13.288.866.546.86 12 13.288.866.546.86 12 13.288.866.546.86 12 13.288.866.546.86 12 13.288.866.546.86 12 13.288.866.546.86 12 13.288.866.546.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.288.866.86 13.2	Policy State Reported % 100

		4. rasio Linmas per							SATUAN POLISI PAMONG
		jumlah 10.000 penduduk							PRAJA
		5. Angka gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		6. persentase anggota linmas yang terlatih dalam penanganan gangguan kemanan dan ketertiba							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota 12 bulan	%	100	6.778.199.945,42	6.964.515.503,90	7.522.513.754,32	21.265.229.203,64	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2. persentase kelurahan memiliki kelompok kader siaga kebakaran							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		3. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000- 5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		4. Jumlah upaya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		5. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)		13					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	729.532.038,04	749.585.027,06	809.641.915,93	2.288.758.981,02	BPBD
		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100					BPBD
		Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	100					BPBD
		Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100					BPBD
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase dokumen kebencanaan yang tersedia	%	80	4.568.083.305	4.693.648.351	5.069.704.312	14.331.435.967,79	BPBD
		2. Persentase kelurahan siaga bencana	%	60	0,00	0,00	0,00	-	BPBD
		3. Perentase penanganan tanggap darurat	%	100	0,00	0,00	0,00	-	BPBD

	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan sosial	%	100							
			100	0,00		0,00	0,00		-	BPBD
	5. Persentase obyek terdampak bencana yang tertangani dengan baik	%	85	0,00		0,00	0,00		-	BPBD
				0,00		0,00	0,00		-	
JRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENUNJANG JRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Upaya Pelayanan Administrasi Perkantoran	upaya	11	1.190.548.181,10	1.223.27	336,90	1.321.282.219,41	3.73	35.103.737,40	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	upaya	5							DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	2							DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6							DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMBERDAYAAN GOSIAL	Menurunnya Angka Kemiskinan	%	3,2	933.899.924,55	959.57	469,44	1.036.451.430,19	2.9:	29.921.824,18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN									-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	%	9	1.115.182.753,16	1.145.83	304,12	1.237.640.917,47	3.44	98.659.974,75	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga fakir miskin yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi			458.555.693,69	471.16	228,94	508.909.672,28	1.4:	38.625.594,91	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase keluarga fakir miskin yang mendapat bantuan KUBE									DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	%	100	726.683.321,36	746.65	006,37	806.480.381,81	2.2'	79.821.709,54	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	IDANG SOSIAL INAS SOSIAL, EMBERDAYAAN EREMPUAN DAN EREMPUAN DAN ERLINDUNGAN ANAK ROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN AERAH ROGRAM PEMBERDAYAAN OSIAL ROGRAM PENANGANAN ROGRAM REHABILITASI OSIAL ROGRAM PERLINDUNGAN AN JAMINAN SOSIAL ROGRAM PERLINDUNGAN AN JAMINAN SOSIAL	IDANG SOSIAL INAS SOSIAL, EMBERDAYAAN EREMPUAN DAN EREINDUNGAN ANAK ROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN AERAH Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan ROGRAM PEMBERDAYAAN DISIAL ROGRAM PEMBERDAYAAN ORBAN TINDAK EKERASAN Terpenuhinya Kebutuhan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya Angka Kemiskinan Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlant	IDANG SOSIAL INAS SOSIAL, EMBERDAYAAN EREMPUAN DAN ERINDUNGAN ANAK ROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN AERAH Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dokumen ROGRAM PEMBERDAYAAN OSIAL ROGRAM PENANGANAN ARGA NEGARA MIGRAN ORBAN TINDAK EKERASAN Terpenuhinya Kebutuhan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dokumen **Ookumen **O	IDANG SOSIAL INAS SOSIAL, EMBERDAYAAN ERERMPUAN DAN ERLINDUNGAN ANAK ROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN AERAH Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dokumen 6 ROGRAM PEMBERDAYAAN Menurunnya Angka Kemiskinan Menurunnya Angka Kemiskinan Terpenuhinya Kebutuhan pasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lan	RUSAN PEMERINTAHAN IDANG SOSIAL REMBERDAYAAN REMBURDAYAAN REMBURDAYAAN REMBURDAYAAN REMBURDAYAAN REMBURDAYAAN REMBURDAYAAN ROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN AERAH Terpenuhinya kebutuhan peningkatan Kapasitas Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan ROGRAM PEMBERDAYAAN Menurunnya Angka Kemiskinan ROGRAM PENANGANAN ROBBAN TINDAK EKERASAN Terpenuhinya Kebutuhan peningkatan Kapasitas %6 2 3,2 933.899.924.55 ROGRAM PENANGANAN ROBBAN TINDAK EKERASAN Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usi	RUSAN PEMERINTAHAN IDANG SOSIAL EMBERDAYAAN REICHUNDUKAN ANAK ROGRAM PENINJANC RUSAN PERERINTAHAN AERAH Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Kemiskinan Menurunnya Angka Kemiskinan Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Janjut Usilas Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ROGRAM PERLINDUNGAN AN JAMINAN SOSIAL ROGRAM PERLINDUNGAN AN JAMINAN SOSIAL Persentase keluarga fakir miskin yang mendapat bantuan Kugar bantuan Kugar BROGRAM PENANGANAN AN Jaminan Sungan mendapat bantuan Kugar bantuan Kugar BROGRAM PENANGANAN AN Jaminan Sungan mendapat bantuan Kugar bantuan Kugar BROGRAM PENANGANAN ROGRAM PENANGANAN ROGRAM PENANGANAN AN Jaminan Sosial ROGRAM PENANGANAN ROGRAM PEN	RUSAN PEMERINTAHAN DIANG SOSIAL EMBERDAYAN ERINDIUNGAN ANAK ROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN ROGRAM PENUNJANG ROGRAM PENUNJANANG ROGRAM PENUNJANG ROGRAM PENUNJANG ROGRAM PENUNJANG ROGRAM PEN	REGGAM PENANGANAN ROGGAM PENAN	NASSOSAL NASSOSAL	NEAS PRINTED NEW PRINTED

	URUSAN PEMERINTAHAN								
2	WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								
	PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN								
2.07	BIDANG TENAGA KERJA								
	DINAS PENANAMAN								DINAS PENANAMAN
	MODAL, PELAYANAN								MODAL, PELAYANAN
	TERPADU SATU PINTU DAN								TERPADU SATU PINTU
	TENAGA KERJA								DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PERENCANAAN								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
2.07.02	TENAGA KERJA	TPAK							TERPADU SATU PINTU
	I ENAGA KEKJA								DAN TENAGA KERJA
									DINAS PENANAMAN
		TPAK perempuan							MODAL, PELAYANAN
		I PAK perempuan							TERPADU SATU PINTU
									DAN TENAGA KERJA
		l							DINAS PENANAMAN
		Rasio penduduk yang							MODAL, PELAYANAN
		bekerja							TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
									DINAS PENANAMAN
		Upah rata-rata per jam							MODAL, PELAYANAN
		pekerja							TERPADU SATU PINTU
		r /-							DAN TENAGA KERJA
		Rasio kesempatan kerja							DINAS PENANAMAN
		terhadap penduduk usia							MODAL, PELAYANAN
		15 tahun ke atas							TERPADU SATU PINTU
		To tunum ne utub							DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PELATIHAN	Persentase peningkatan							DINAS PENANAMAN
2.07.03	KERJA DAN PRODUKTIVITAS	kualitas dan produktivitas	%						MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	TENAGA KERJA	tenaga kerja							DAN TENAGA KERJA
									DINAS PENANAMAN
	PROGRAM PENEMPATAN	4 mp. 4 v			454 004 530 40	404 000 007 00	522.040.060.20	4 455 000 004 00	MODAL, PELAYANAN
2.07.04	TENAGA KERJA	1. TPAK	%	68	471.081.528,48	484.030.367,22	522.810.968,39	1.477.922.864,09	TERPADU SATU PINTU
									DAN TENAGA KERJA
									DINAS PENANAMAN
		2. TPAK perempuan	%	40					MODAL, PELAYANAN
		r r.							TERPADU SATU PINTU
	-								DAN TENAGA KERJA DINAS PENANAMAN
		3. Persentase pencari							MODAL, PELAYANAN
		kerja yang terdaftar yang	%	60					TERPADU SATU PINTU
		ditempatkan							DAN TENAGA KERJA
									DINAS PENANAMAN
		4. Rasio penduduk yang	%	65					MODAL, PELAYANAN
		bekerja	/0	05					TERPADU SATU PINTU
									DAN TENAGA KERJA
		E Angles conglects							DINAS PENANAMAN
		5. Angka sengketa pengusaha dan pekerja	kasus	55					MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		pengusana uan pekerja							DAN TENAGA KERJA
									DINAS PENANAMAN
		6. Upah rata-rata per jam	.,	45000					MODAL, PELAYANAN
		pekerja	ribu	17000					TERPADU SATU PINTU
									DAN TENAGA KERJA
		7. Rasio kesempatan kerja							DINAS PENANAMAN
		terhadap penduduk usia	%	73					MODAL, PELAYANAN
		15 tahun ke atas	"	, ,					TERPADU SATU PINTU
			l			l .	ı		DAN TENAGA KERJA

2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan antara pekerja dan pengusaha							DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Angka sengketa pengusaha dan pekerja							DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb								
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Upaya Pelayanan Administrasi Perkantoran	upaya	11	1.041.881.667,18	1.070.520.356,84	1.156.290.642,78	3.268.692.666,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunga Anak Dan Kb
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	upaya	5					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunga Anak Dan Kb
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunga Anak Dan Kb
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Score nilai KLA	score	60	997.203.670,60	1.024.614.275,23	1.106.706.557,54	3.128.524.503,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunga Anak Dan Kb
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan bantuan							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindung Anak Dan Kb
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya sistem data gender dan anak							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunga Anak Dan Kb
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase OPD yang terlibat dalam pencapaian status KLA						-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunga Anak Dan Kb
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terlaksananya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunga Anak Dan Kb
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN								
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	1.130.224.959	1.161.291.982	1.254.334.908	 3.545.851.849,46	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

		Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur Prasarana Aparatur	%	100	0	0	0	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		persentase aparatur yang lulus diklat	%	100	0	0	0	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Persentasi Jumlah Laporan Yang terpenuhi	%	100	0	0	0	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita /hari	2.300	461.761.690,05	474.454.350,03	512.467.718,95	1.448.683.759,02	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		2. Ketersediaan protein per kapita	gr/kapita/ hari	63					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		3. Jumlah Cadangan Pangan	Ton	7,5					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		4. Konsumsi Energi Perkapita	kkal/kapita /hari	2.066					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		5. Konsumsi Protein Perkapita	gr/kapita/ hari	66					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		6. Persentase Pangan yang aman konsumsi	%	100					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Kota Pangkalpinang	%					-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT								
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100	19.298.980.643,50	19.829.460.768,86	21.418.200.776,62	60.546.642.188,98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	860.091.955,41	883.733.706,07	954.538.611,53	2.698.364.273,01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	404.069.310,53	415.176.153,03	448.440.142,02	1.267.685.605,58	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100	116.011.168,03	119.200.021,38	128.750.348,80	363.961.538,21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	Presentase jumlah laporan yang terpenuhinya	%	100	25.149.883,91		25.841.190,56		27.911.591,45		78.902.665,92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase ketepatan waktu penyusunan	%									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Program Perencanaan Lingkungan Hidup										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Presentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan	%	31	2.817.513.252,97		2.894.959.560,17		3.126.904.247,31		8.839.377.060,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2. Peresentase peningkatan penyelesaian pengaduan masyarat terhadap izin lingkungan	%	100	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3. Nilai untuk mencapai Adipura	nilai	76	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	4. Indeks Kualitas LH	indeks	75	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	5. Indeks Kualitas Air	indeks	63	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	6. Indeks Kualitas udara	indeks	80	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	7. Indeks tutupan lahan	indeks	0,3	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Nilai untuk mencapai Adipura										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Peresentase peningkatan penyelesaian pengaduan masyarat terhadap izin lingkungan										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Presentase sampah terkelola dengan metode 3R	%	12	17.909.105.365,27		18.401.381.337,50		19.875.703.361,16		56.186.190.063,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGENDALIAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	laporan yang terpenuhinya Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2. Persentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan 3. Nilai untuk mencapai Adipura 4. Indeks Kualitas LH 5. Indeks Kualitas Air 6. Indeks Kualitas udara 7. Indeks Kualitas udara 7. Indeks tutupan lahan PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK BAYARAKAT PROGRAM PENGHARGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK BAYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK BAYARAKAT PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK BAYARAKAT	laporan yang terpenuhinya Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Terlaksananya Program Perencanaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2. Peresentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan 3. Nilai untuk mencapai Adipura 4. Indeks Kualitas LH indeks 5. Indeks Kualitas Air indeks 6. Indeks Kualitas udara indeks 7. Indeks tutupan lahan indeks PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGENDALIAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH) PROGRAM PENGHARGAN AN PENGELOLAAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGELOLAAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGHARGANAN PENGEADAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGEADAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGEADAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PERSENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGEADAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	laporan yang terpenuhinya Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan PROGRAM PERENCANAAN Laporan kinerja PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 2. Peresentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan 3. Nilai untuk mencapai Adipura 4. Indeks Kualitas LH indeks 5. Indeks Kualitas LH indeks 6. Indeks Kualitas udara indeks 6. Indeks Kualitas udara indeks 7. Indeks tutupan lahan indeks 9. Alamora dan pengawasan ketaatan indeks 80. T. Indeks tutupan lahan indeks PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERAHAYA DAN BAHAN BAHAN BERAHAYA BAHAN BA	laporan yang terpenuhinya terpenuhinya persentase ketepatan waktu penysuanan laporan kinerja Persentase ketepatan waktu penysuanan laporan keuerja Persentase ketepatan waktu penysuanan laporan keuangan Persentasa ketepatan waktu penysuanan laporan keuangan Persentasa pengatan mayarat terfaksananya Program Perencananan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Presentase pembinaan dan pengadwasan ketaatan peningkatan penyelesaian peningkatasa peningkatan penyelesaian pengaduan mayarat terhadap izin lingkungan lindkas 0.3 0,00 peningkatan penyelesaian pengaduan mayarat terhadap izin lingkungan ling	Iaporan yang terpenuhinya Persentase ketepatan waktu penyasunan laporan kenangan Persentase pendan ke	laporan yang % 100 25.149.883.91 25.841.190.56	Importany parts 100 25.149.883.91 25.841.190.56	Experiminary September S	Supremary 100 25.149883.01 25.841.190.56 27.911.591.45	Part

	I			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		I	l	1	I	
		2. Persentase penanganan sampah perkotaan	%	75						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3. Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	65						DINAS LINGKUNGAN HIDUP
										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	784.602.316,41	806.169.047,99		870.759.458,92	2.461.530.823,32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	%	100						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase aparatur yang mendapat peningkatan kapasitas	%	100						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase laporan keuangan dan kinerja yang dibuat	%	100						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja	%							DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%							DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	79	1.420.209.184,09	1.459.247.139,51		1.576.162.286,06	4.455.618.609,66	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2. Persentase keserasian Database Kependudukan	%	94						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan Pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk							-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan Kepemilikan Akte Kematian								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase keserasian database penduduk	%					-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb								
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Cakupan Peserta KB Aktif			1.459.850.692,68	1.499.978.292,83	1.620.156.826,80	4.579.985.812,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
		2. Contraceptive Prevalence Rate Moder	%	63,49					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
		3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Jumlah	2,23					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Contraceptive Prevalence Rate Modern						-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa			1.407.726.543,56	1.446.421.382,79	1.562.308.927,38	4.416.456.853,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang tertangani	%	100	5.822.480.241,16	5.982.525.484,23	6.461.846.515,45	18.266.852.240,84	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik	%	100	0,00	0,00	0,00	-	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Meningkatnya Aparatur yang Profesional dan Kompeten	%	100	0,00	0,00	0,00	-	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	0,00	0,00	0,00	-	DINAS PERHUBUNGAN

2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	91	11.392.243.685,28	11.705.387.6	6,40	12.643.225.414,59	35.740.856.726,27	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Layanan angkutan darat	%	95	0,00		0,00	0,00	-	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan terbangun			0,00		0,00	0,00	-	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase menurunnya angka Pelanggaran Lalu Lintas			0,00		0,00	0,00	-	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase LPJU yang Berfungsi Baik			0,00		0,00	0,00	-	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase jaringan jalan yang terlayani trayek angkutan			0,00		0,00	0,00	-	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase pertumbuhan pendapatan daerah dari sektor perparkiran dan lainnya			0,00		0,00	0,00	-	DINAS PERHUBUNGAN
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	%	100	1.216.341.813,84	1.249.775.91	1,32	1.349.908.249,72	3.816.026.034,88	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	%	100						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase peningkatan kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PPID aktif	%	100	429.741.450,14	441.553.9	4,78	476.931.338,05	1.348.226.742,97	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase OPD yang aktif dan update websitenya	%	100	2.435.613.900,34	2.502.562.70	1,06	2.703.068.545,20	7.641.245.206,60	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2. Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistic sektoral								DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		3. Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi								DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	1					l			1	

2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN								
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1. Persentase Koperasi Aktif	%	40	197.090.104	202.507.612	218.732.559	618.330.276,13	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	10					DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		%						DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT	%						DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Baru	%	100	72.369.430	74.358.682	80.316.313	227.044.425,58	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM)	%	3					DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		3. Persentase usaha mikro dan kecil	%	34					DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMi menjadi UK	%					-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	2.961.176.094,50	3.042.571.329,56	3.286.342.698,54	9.290.090.122,60	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	%	100					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

		Persentase ketepatan								DINAS PENANAMAN
		waktu penyusunan								MODAL, PELAYANAN
		laporan keuangan								TERPADU SATU PINTU
										DAN TENAGA KERJA
		Persentase ketepatan								DINAS PENANAMAN
		waktu penyusunan								MODAL, PELAYANAN
		laporan kinerja								TERPADU SATU PINTU
										DAN TENAGA KERJA
										DINAS PENANAMAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN									MODAL, PELAYANAN
2.18.02	IKLIM PENANAMAN MODAL									TERPADU SATU PINTU
	TREES TENTING THE STATE OF THE									DAN TENAGA KERJA
		1. Jumlah upaya dalam						 		DINAS PENANAMAN
	PROGRAM PROMOSI	meningkatkan iklim								MODAL, PELAYANAN
2.18.03					389.627.774,15	400.337.655,38		432.412.781,23	1.222.378.210,76	
	PENANAMAN MODAL	investasi dan realisasi								TERPADU SATU PINTU
		investasi								DAN TENAGA KERJA
										DINAS PENANAMAN
		2. Persentase realisasi	%	65						MODAL, PELAYANAN
		Investasi	70	03						TERPADU SATU PINTU
										DAN TENAGA KERJA
										DINAS PENANAMAN
	PROGRAM PELAYANAN	1. Persentase perizinan			(#0.0#0.¢#0.#0				0.000 =0= 1== 1	MODAL, PELAYANAN
2.18.04	PENANAMAN MODAL	yang diterbitkan	%	100	659.352.678,52	677.476.614,60		731.756.164,33	2.068.585.457,44	TERPADU SATU PINTU
		, , , , , , , , ,								DAN TENAGA KERJA
								<u> </u>		DINAS PENANAMAN
		2. Indeks kepuasan								MODAL, PELAYANAN
		masyarakat terhadap								TERPADU SATU PINTU
		pelayanan perizinan								DAN TENAGA KERJA
										DINAS PENANAMAN
		Persentase pelaksanaan								MODAL, PELAYANAN
		Perijinan Tepat Waktu								TERPADU SATU PINTU
										DAN TENAGA KERJA
										DINAS PENANAMAN
		Persentase realisasi								MODAL, PELAYANAN
		pendapatan terhadap PAD								TERPADU SATU PINTU
										DAN TENAGA KERJA
										DINAS PENANAMAN
	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase perizinan yang								MODAL, PELAYANAN
2.18.05	PELAKSANAAN	diterbitkan							=	TERPADU SATU PINTU
	PENANAMAN MODAL	uitei bitkaii								DAN TENAGA KERJA
										DINAS PENANAMAN
		Indeks kepuasan								MODAL, PELAYANAN
		masyarakat terhadap								TERPADU SATU PINTU
		pelayanan KPPT					1	1		
								1		DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENGELOLAAN									DINAS PENANAMAN
2.18.06	DATA DAN SISTEM	Persentase perizinan yang							_	MODAL, PELAYANAN
2.10.00	INFORMASI PENANAMAN	diterbitkan								TERPADU SATU PINTU
	MODAL									DAN TENAGA KERJA
	URUSAN PEMERINTAHAN									
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	DINAS PEMUDA DAN									DINAS PEMUDA DAN
	OLAHRAGA									OLAHRAGA
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase layanan administrasi perkantoran			530.486.666,71	545.068.402,32		588.739.381,98	1.664.294.451,00	DINAS PEMUDA DAN
,	DAERAH	yang tertangani			555.155.500,71	0 101000.102,02		555.757.551,76	100 11271.101,00	OLAHRAGA
										+
		Persentase sarana dan								DINAS PEMUDA DAN

		Persentase meningkatnya							DINAS PEMUDA DAN
		aparatur yang profesional dan kompeten							OLAHRAGA
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan							DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan			595.996.627,32	612.379.065,93	661.442.988,20	1.869.818.681,45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rasio prestasi pemuda di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	95	4.704.890.354,97	4.834.215.881,09	5.221.534.137,80	14.760.640.373,87	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	92	0,00	0,00	0,00	-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan							DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN								
2.20	BIDANG STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN								
	INFORMATIKA								
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang aktif dan update websitenyaPersentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistic sektoralPersentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi	%	100	499.224.223,52	512.946.633,71	554.044.011,41	1.566.214.868,65	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN								
2.21	BIDANG PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN								
	INFORMATIKA	Persentase OPD yang aktif							
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	dan update websitenyaPersentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistic sektoraPersentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi	%		73.133.059,30	75.143.301,97	81.163.797,01	229.440.158,28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

							I		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota,provinsi dan nasional						-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kesenian tradisional yang dilindungi						-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Jumlah tempat pementasan seni budaya							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan						-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	cagar budaya	36	2.423.179.839,83	2.489.786.919,70	2.689.269.101,10	7.602.235.860,63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. Jumlah Seni dan Budaya yang dilestarikan	buah	9					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3. Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan	buah	11					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		4. Jumlah tempat pementasan seni budaya	buah	4					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Cagar Budaya dan permuseuman yang dilindungi						-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	873.603.942,26	897.617.103,23	969.534.349,00	2.740.755.394,48	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	100					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	178.786	410.411.329,54	421.692.498,10	455.478.577,84	1.287.582.405,48	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

		2. Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan	Judul	25.357					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	%	87	318.860.841,39	327.625.518,77	353.874.935,00	1.000.361.295,16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2. Persentase SDM kearsipan yang memiliki kompetensi	%	36					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP							-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi	%	100	1.328.233.067,10	1.364.742.831,89	1.474.086.276,10	4.167.062.175,08	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan/dibangun/peli hara/rehab	%	100					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Persentase sumberdaya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja							DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan							DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	3.212,00	783.045.819,71	804.569.767,13	869.032.043,39	2.456.647.630,24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	907.285,00	1.223.134.713,81	1.256.755.590,90	1.357.447.077,70	3.837.337.382,41	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan masyarakat	kg/kapita/t ahun	52	351.296.625,12	360.952.880,09	389.872.490,58	1.102.121.995,79	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
	DINAS PARIWISATA								DINAS PARIWISATA
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan adminis	%	100	801.749.636,55	823.787.704,55	889.789.725,45	2.515.327.066,54	DINAS PARIWISATA
		Persentase sarana dan pras	%	100					DINAS PARIWISATA
		Persentase meningkatnya k	%	100					DINAS PARIWISATA
		Persentase ketepatan wakt	%	100					DINAS PARIWISATA
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase meningkatnya PAD sektor pariwisata	%	2,1	1.241.222.686,70	1.275.340.756,38	1.377.521.290,03	3.894.084.733,11	DINAS PARIWISATA
		Persentase destinasi wisata dengan sarana dan fasilitas publik yang tersedia							DINAS PARIWISATA
		Jumlah jenis upaya pengembangan kemitraan							DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3	2.423.255.204,29	2.489.864.355,75	2.689.352.741,33	7.602.472.301,37	DINAS PARIWISATA
		Persentase penyelenggaraan even dalam rangka mempromosikan potensi wisata daerah	%						DINAS PARIWISATA
		Jumlah jenis upaya pengembangan pemasaran pariwisata							DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif							DINAS PARIWISATA
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN								
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi Jagung	Ton	60	1.398.782.525,27	1.437.231.516,08	1.552.382.766,87	4.388.396.808,23	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		2. Jumlah produksi Nanas	Ton	2.100					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		3. Jumlah produksi Jahe Merah	Ton	2					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		4. Jumlah produksi Cabe	Ton	17					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		5. Jumlah produksi Daging	Ton	5.278					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		6. Jumlah produksi Telur	Ton	140					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		7. Jumlah produksi Susu	Liter	132.613					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		8. Jumlah populasi ternak	Ekor	76.939					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	1.600					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Jumlah Sarana Pertanian							DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

			 				1	1
		Persentase Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak/Bahan/Pakan/Tan						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		aman Bersekala Kecil Perentase Pengadaan Sarana Pendukung Pertanian						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Persentase gedung Puskeswan dalam Kondisi baik						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Jumlah kegiatan upaya Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Tersusunnya SED dan DED					-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Persentase Rehabilitasi Puskeswan						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN DINAS PANGAN DAN
		Jumlah produksi Jagung						PERTANIAN DINAS PANGAN DAN
		Jumlah produksi Nanas Jumlah produksi Jahe Merah						PERTANIAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Jumlah produksi Cabe						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Jumlah prasarana pertanian						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Pesentase Pelayanan Pemotongan Hewan Meningkat						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Meningkat						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Persentase Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan meningkat						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Pengetahuan Penerarapan Teknologi PHT					-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah pengetahuan, keterampilan petani dan masyarakat dalam pengembangan diversifikasi pangan						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							

3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN								
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase sarana prasarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan	%	20	11.026.062.576,15	11.329.141.125,51	12.236.833.975,53	34.592.037.677,20	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%		0,00	0,00	0,00	-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		3. Persentase pemilik UTTP yang tertib niaga	%		0,00	0,00	0,00	-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana yang memiliki informasi perdagangan	%		0,00	0,00	0,00	-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%		0,00	0,00	0,00	-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah			0,00	0,00	0,00	-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB;						-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN								DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	1.078.639.185,12	1.108.288.245,90	1.197.084.501,99	3.384.011.933,01	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	%						DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		1. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100					DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%						DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

									Г
		Persentase aparatur yang lulus diklat	%	100					DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	%						DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase jumlah Laporan yang terpenuhi	%	100					DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	%						DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	5	1.544.275.786,28	1.586.724.018,54	1.713.852.635,85	4.844.852.440,67	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. persentase jumlah industri yang mendapat fasilitas untuk peningkatan daya saing	%	20					DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		3. penyusunan RPIK Kota Pangkalpinan	jenis	1					DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		Tersedianya fasilitas saran dan prasarana industri	jenis	1					DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		5. tersedianyan sistem informasi industri	data/infor masi	1					DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Sistem Informasi Industri						-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
	SEKRETARIAT DAERAH								SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana Dengan Baik	%	100	17.553.954.419,97	18.036.468.191,72	19.481.553.307,69	55.071.975.919,38	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100					SEKRETARIAT DAERAH

		Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan	%	100	19.285.719.804,73	19.815.835.423,20	21.403.483.765,78	60.505.038.993,72	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pembinaan kerukunan agama	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase meningkatnya kerjasama daerah	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa							SEKRETARIAT DAERAH
		Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kelembagaan							SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Meningkatnya Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100	6.840.449.728,44	7.028.476.375,88	7.591.599.183,00	21.460.525.287,32	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase peningkatan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
		Persentasenya Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase peningkatan Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase pengembangan dan pembinaan lembaga ekonomi dan keuangan							SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang dilaksanakan	%	100	8.606.029.201,77	8.842.587.159,63	9.551.056.853,10	26.999.673.214,50	SEKRETARIAT DAERAH

		Persentase Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang- undangan	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase meningkatnya komunikasi dan informasi serta media massa dan protokol	%	100					SEKRETARIAT DAERAH
4.02	SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi perkantoran yang dapat dipenuhi	%	100	3.613.806.907,08	3.713.141.311,13	4.010.638.869,14	11.337.587.087,35	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Dapat disediakan/dibangun/ dipelihara/rehab	%	100					SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Sumberdaya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100					SEKRETARIAT DPRD
		LAKIP dengan nilai BB	%	100					SEKRETARIAT DPRD
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan							SEKRETARIAT DPRD
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja							SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Terlaksananya layanan dan administrasi keuangan			16.125.167.116,08	16.568.407.141,61	17.895.870.938,91	50.589.445.196,61	SEKRETARIAT DPRD
4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD			13.331.405.646,99	13.697.852.241,73	14.795.326.657,72	41.824.584.546,44	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase propemperda yang dibahas	%	100					SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	2.667.747.840,96	2.741.077.476,10	2.960.693.102,64	8.369.518.419,70	BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur	%	100					BAPPEDA dan LITBANG

		Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya	%	100					BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100					BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja							BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan							BAPPEDA dan LITBANG
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RPKD	%	100	2.467.436.093,05	2.535.259.665,30	2.738.385.131,35	7.741.080.889,71	BAPPEDA dan LITBANG
		2. Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	0,00	0,00	0,00	-	BAPPEDA dan LITBANG
		3. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	0,00	0,00	0,00	-	BAPPEDA dan LITBANG
		4. Persentase Tersedianya data informasi komposit	%	100				-	BAPPEDA dan LITBANG
5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Program RKPD bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia yang sesuai dengan Program RPJMD	%		385.468.948,46	396.064.514,10	427.797.275,09	1.209.330.737,65	BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan APBD	%		0,00	0,00	0,00	-	BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terakomodir dalam RKPD	%		0,00	0,00	0,00		BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase hasil data bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah	%						BAPPEDA dan LITBANG
5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Program RKPD bidang Perekonomian dan SDA yang sesuai dengan Program RPJMD	%		701.757.426,25	721.046.961,50	778.817.375,36	2.201.621.763,12	BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD bidang Perekonomian dan SDA dengan APBD	%		0,00	0,00	0,00	-	BAPPEDA dan LITBANG

		Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan bidang perekonomian dan SDA yang terakomodir dalam RKPD	%		0,00	0,00	0,00		BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase hasil data bidang perekonomian dan SDA yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah	%						BAPPEDA dan LITBANG
5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase Program RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan SDA yang sesuai dengan Program RPJMD	%		1.827.706.301,03	1.877.945.320,67	2.028.406.641,74	5.734.058.263,45	BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan APBD	%		0,00	0,00	0,00	-	BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terakomodir dalam RKPD	%		0,00	0,00	0,00	-	BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase hasil data bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah	%						BAPPEDA dan LITBANG
5.02	KEUANGAN								D.D.L.V.VIII.V.L.V.
	BADAN KEUANGAN DAERAH								BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	4.797.179.755,64	4.929.042.083,76	5.323.957.833,10	15.050.179.672,50	BADAN KEUANGAN DAERAH
		1. Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur	%	100	0	0	0	-	BADAN KEUANGAN DAERAH
		2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			0	0	0	-	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya	%	100	0	0	0	-	BADAN KEUANGAN DAERAH
		2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			0	0	0	-	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100	0	0	 0	-	BADAN KEUANGAN DAERAH

1									1		
	2. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan										BADAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	%	86	7.830.824.692,94		8.046.074.241,16		8.690.727.174,56		24.567.626.108,66	BADAN KEUANGAN DAERAH
	2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja										BADAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah	%	100	1.644.754.302,83		1.689.964.435,16		1.825.364.693,45		5.160.083.431,45	BADAN KEUANGAN DAERAH
	2. Meningkatnya jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah										BADAN KEUANGAN DAERAH
	Meningkatnya Tanah Milik Pemkot yang bersertifikat										BADAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD			894.832.719,24		919.429.405,56		993.094.256,96		2.807.356.381,76	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah										BADAN KEUANGAN DAERAH
KEDECAMAIAN											
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	%	100	546.292.158,60		561.308.347,18		606.280.474,18		1.713.880.979,96	BKPSDM
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	200.437.409,14		205.946.926,14		222.447.431,36		628.831.766,63	
	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	%	100	105.204.585,12		108.096.392,86		116.757.095,54		330.058.073,51	
	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	61.406.004,66		63.093.900,29		68.148.995,07		192.648.900,03	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	85	1.773.924.186,78		1.822.684.872,24		1.968.718.716,12		5.565.327.775,14	BKPSDM
	Nilai IKM Pelayanan Kepegawajan	Nilai	75								
	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi										
	Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik										
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PErsentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase perawai dengan penilaian prestasi kerja baik Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi Persentase pegawai dengan penilaian prestasi dengan penilaian prestasi	Retepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN Baran pelanja keuangan daerah PROGRAM PENGELOLAAN Baran pelanja belanja terhadap anggaran belanja belanja terhadap anggaran belanja belanja belanja pelanja 1. Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah 2. Meningkatnya jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah Meningkatnya Tanah Milik Pemkot yang bersertifikat PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatnya besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD Meningkatnya pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase pegawai dengan penilalan prestasi kerja baik Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan penilaian prestasi	Retepatan waktu Penyusunan laporan Capatan kinerja dan Reuangan	REPEGAWAIAN PENGELOLAAN BARAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK Pemkot yang bersertifikat Meningkatnya jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah Meningkatnya pemarah BARANG WARANG BARANG	Retepatan waktu penyusunan laporan capalan kinerja dan keuangan Reuungan darah keuangan Reuungan darah keuangan darah belanja terhadap anggarah belanja (2. Meningkatruya rasio belanja terhadap anggarah belanja (2. Meningkatruya rasio belanja (3. Meningkatruya maha set yang dikelola pemerintah daerah (3. Meningkatruya Tanah Milik Penkot yang Dersertilikat (3. Meningkatruya besarah PENDAPATAN DAERAH (4. Meningkatruya besarah PENDAPATAN DAERAH (4. Meningkatruya besarah PENDAPATAN DAERAH (4. Meningkatruya besarah pendapatan pajak dan retribusi daerah (4. Meningkatruya besarah pendapatan daham APBD (4. Meningkatruya besarah pajak dan retribusi daerah (4. Meningkatruya besarah (4. Meningkatruya besa	Retepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keungan	Receptan wakeu peryusuran laporan capaian foreria dan Receptan keripatan keripatan capaian foreria dan Receptan keripatan capaian foreria dan Receptan keripatan capaian foreria dan Receptan capaian foreria dan capaian foreria capaian	Record	Reception waits prome	No. No.

5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Reformasi Birokrasi (Sub Komponen penataan sistem manajemen SDM)	Nilai	62,5	1.805.039.087,98	1.854.655.043,32	2.003.250.343,13	5.662.944.474,43	BKPSDM
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	61,5					
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang digunakan dalam perenanaan pembangunan daerah	%	100	1.351.621.807,72	1.388.774.469,78	1.500.043.333,19	4.240.439.610,69	BAPPEDA dan LITBANG
		2. Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	20					BAPPEDA dan LITBANG
		3. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	20					BAPPEDA dan LITBANG
		4. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	20					BAPPEDA dan LITBANG
		5. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	20					BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%						BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%						BAPPEDA dan LITBANG
								-	BAPPEDA dan LITBANG
5.06	PENGHUBUNG								
5.07	PENGELOAAN PERBATASAN								
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT								

6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Jumlah Kegiatan Terpenuhinya Pelayananan Administrasi Perkantoran			1.325.456.407,67	1.361.889.849,12	1.471.004.711,83	4.158.350.968,62	INSPEKTORAT
		2. Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100					INSPEKTORAT
		1. Jumlah Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							INSPEKTORAT
		2. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100					INSPEKTORAT
		1. Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							INSPEKTORAT
		2. Terpenuhinya Kebutuhan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100					INSPEKTORAT
		1. Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							INSPEKTORAT
		Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100					INSPEKTORAT
		1. Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan							INSPEKTORAT
		2. Persentase APIP yang memiliki standar Kompetensi Pengawasan	%	75					INSPEKTORAT
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja							INSPEKTORAT
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan							INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			806.887.949,75	829.067.256,97	895.492.276,57	2.531.447.483,29	INSPEKTORAT
		2. Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB	%	20					INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan			1.443.960.115,11	1.483.650.923,50	1.602.521.305,66	4.530.132.344,27	INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
	KECAMATAN BUKIT INTAN								

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	1077242838	1106853517	,	1195534822	3.379.631.176,51	KECAMATAN BUKIT INTAN
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	0	0		0	-	KECAMATAN BUKIT INTAN
		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	0	O	,	0	-	KECAMATAN BUKIT INTAN
		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	0	O	,	0	-	KECAMATAN BUKIT INTAN
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja	%	100	0	O		0	-	KECAMATAN BUKIT INTAN
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%	100	0	C		0	-	KECAMATAN BUKIT INTAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Indek kepuasan masyarakat		4	7.498.826.486,23	7.704.950.244,16		8.322.272.260,80	23.526.048.991,19	KECAMATAN BUKIT INTAN
		2. Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	85						KECAMATAN BUKIT INTAN
		3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	80						KECAMATAN BUKIT INTAN
		4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	80						KECAMATAN BUKIT INTAN
		5. Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%							KECAMATAN BUKIT INTAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%						-	KECAMATAN BUKIT INTAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								-	KECAMATAN BUKIT INTAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								-	KECAMATAN BUKIT INTAN
	KECAMATAN RANGKUI									KECAMATAN RANGKUI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	1.026.339.753,49	1.054.551.235,28		1.139.042.072,29	3.219.933.061,05	KECAMATAN RANGKUI
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100						KECAMATAN RANGKUI
		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100						KECAMATAN RANGKUI
		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan	5						KECAMATAN RANGKUI
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja	%		0	0		0	-	KECAMATAN RANGKUI

		Persentase ketepatan waktu penyusunan	%						KECAMATAN RANGKUI
	PROGRAM	laporan keuangan	70					-	KECAMATAN KANGKUI
7.01.02	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	%	80	8.545.190.939,08	8.780.076.607,10	9.483.537.943,71	26.808.805.489,88	KECAMATAN RANGKUI
		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan							KECAMATAN RANGKUI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun						-	KECAMATAN RANGKUI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							-	KECAMATAN RANGKUI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							-	KECAMATAN RANGKUI
	KECAMATAN GERUNGGANG								KECAMATAN GERUNGGANG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1.001.836.280,22	1.029.374.223,56	1.111.847.873,80	3.143.058.377,58	KECAMATAN GERUNGGANG
		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100					KECAMATAN GERUNGGANG
		Persentase terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100					KECAMATAN GERUNGGANG
		Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	dokumen	7					KECAMATAN GERUNGGANG
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja							KECAMATAN GERUNGGANG
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan						1.029.374.223,56	KECAMATAN GERUNGGANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	%	100	6.578.778.690,81	6.759.612.663,81	7.301.194.061,36	20.639.585.415,98	KECAMATAN GERUNGGANG
		2. Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%						KECAMATAN GERUNGGANG
		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan							KECAMATAN GERUNGGANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun						-	KECAMATAN GERUNGGANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							-	KECAMATAN GERUNGGANG

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							-	KECAMATAN GERUNGGANG
	KECAMATAN TAMAN SARI								KECAMATAN TAMAN SARI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	1.072.132.831,48	1.101.603.049,07	1.189.863.685,97	3.363.599.566,52	KECAMATAN TAMAN SARI
		1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100					KECAMATAN TAMAN SARI
		2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik							KECAMATAN TAMAN SARI
		Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100					KECAMATAN TAMAN SARI
		2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur							KECAMATAN TAMAN SARI
		1. Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	dokumen	7					KECAMATAN TAMAN SARI
		2. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan						-	KECAMATAN TAMAN SARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	%	100	5.513.023.847,84	5.664.562.918,01	6.118.408.730,52	17.295.995.496,36	KECAMATAN TAMAN SARI
		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan						-	KECAMATAN TAMAN SARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun						-	KECAMATAN TAMAN SARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							-	KECAMATAN TAMAN SARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							-	KECAMATAN TAMAN SARI
	KECAMATAN PANGKALBALA	<u> </u> M							KECAMATAN PANGKALBAL
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	942.304.365,33	968.205.927,03	1.045.778.762,21	2.956.289.054,57	KECAMATAN PANGKALBALAM
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100					KECAMATAN PANGKALBALAM

		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100					KECAMATAN PANGKALBALAM
		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100					KECAMATAN PANGKALBALAM
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja							KECAMATAN PANGKALBALAM
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan						-	KECAMATAN PANGKALBALAM
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	%	40	5.642.848.235,09	5.797.955.849,03	6.262.489.127,47	17.703.293.211,58	KECAMATAN PANGKALBALAM
		2. Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	40					KECAMATAN PANGKALBALAM
		3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	40					KECAMATAN PANGKALBALAM
		4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	40					KECAMATAN PANGKALBALAM
		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan							KECAMATAN PANGKALBALAM
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun						-	KECAMATAN PANGKALBALAM
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							-	KECAMATAN PANGKALBALAM
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							-	KECAMATAN PANGKALBALAM
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	1.005.061.017,48	1.032.687.600,68	1.115.426.719,30	3.153.175.337,46	KECAMATAN GIRIMAYA KECAMATAN GIRIMAYA
	DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100					KECAMATAN GIRIMAYA
		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100					KECAMATAN GIRIMAYA
		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100					KECAMATAN GIRIMAYA
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja							KECAMATAN GIRIMAYA
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan						-	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	%	40	5.580.094.589,50	5.733.477.264,58	6.192.844.507,09	17.506.416.361,18	KECAMATAN GIRIMAYA

		2. Persentase waktu pelayanan administrasi tepat wakt	%	40						KECAMATAN GIRIMAYA
		3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	40						KECAMATAN GIRIMAYA
		4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	40						KECAMATAN GIRIMAYA
		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan								KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun							-	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								-	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								-	KECAMATAN GIRIMAYA
	KECAMATAN GABEK									KECAMATAN GABEK
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	1.190.446.595,41	1.223.168.958,88		1.321.169.478,60	3.734.785.032,89	KECAMATAN GABEK
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12						KECAMATAN GABEK
		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bulan	12						KECAMATAN GABEK
		Nilai Laporan Capaian	Dokumen	1						KECAMATAN GABEK
		Kinerja dan Keuangan Persentase ketepatan waktu penyusunan	20mmin 1							KECAMATAN GABEK
		laporan kinerja Persentase ketepatan waktu penyusunan							-	KECAMATAN GABEK
	DDOCDAM	laporan keuangan								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik			6.390.168.375,62	6.565.817.928,49		7.091.872.456,56	20.047.858.760,68	KECAMATAN GABEK
		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan								KECAMATAN GABEK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun							-	KECAMATAN GABEK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								-	KECAMATAN GABEK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								-	KECAMATAN GABEK
		l					<u> </u>			

8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	70	728.787.131,45	748.819.644,87	808.815.211,18	2.286.421.987,50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 75%	%	75					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75%	%	75					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		nilai laporan capaian kinerja keuangan 30 Lap	Skor/Perin gkat	25					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	%	70	111.242.762,07	114.300.544,01	123.458.324,41	349.001.630,48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		persentase Aparatur Yang Menaati Peraturan Yang Berlaku							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi 70%	%	70	271.418.921,17	278.879.540,26	301.223.419,81	851.521.881,23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase terdatanya kegiatan politik di daerah							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah kegiatan Ormas/LSM/LNL			0,00	0,00	0,00	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan 70%	%	70	1.131.445.793,55	1.162.546.374,33	1.255.689.801,54	3.549.681.969,43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		2. Koordinasi pencegahan penyalahagunaan narkotka							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,sosial dan budaya							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Pelatihan/Sosialisa si Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			39.085.294,78	40.159.650,60	43.377.249,12	122.622.194,49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan							BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	GRAND TOTAL				535.223.530.000,00	549.935.470.000,00	593.996.400.000,00	1.679.155.400.000,00	